



RENCANA KERJA 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 secara baik dan tepat waktu.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/SE/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dilakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP. Renja DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 – 2026. Penyusunan Renja DPMPTSP juga mengacu pada hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun sebelumnya serta hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun berjalan.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan dari segi substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan keuangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan dokumen Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Benni Agusandra
NIP 196908081997031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adapun Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan pertama** Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal Untuk Mendukung Pembangunan Kota dengan indikator realisasi nilai investasi. Pada akhir periode Renstra ditargetkan sebesar 492 triliun, estimasi pada tahun 2024 tercapai 316,93 triliun, dan tahun 2025 ditargetkan sebesar 160,75 triliun.

Tujuan pertama tersebut diturunkan menjadi sasaran yakni Perbaikan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing dengan indikator Score Of Business Enabling Environment. Pada akhir periode Renstra ditargetkan tercapai sebesar 80,01 dengan proyeksi tahun 2024 sebesar 73,84 dan target 2025 sebesar 76,05.

2. **Tujuan kedua** Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Terpadu. Pada akhir periode Renstra ditargetkan sebesar 91 dan pada tahun 2024 serta 2025 diproyeksikan sebesar 91.

Tujuan kedua tersebut diturunkan menjadi sasaran yakni Pengembangan Layanan Berbasis Digital Dan Aksesibilitas Perizinan dengan indikator Persentase Izin Yang Diterbitkan Secara Online. Untuk akhir periode Renstra, proyeksi 2024 dan target 2025 ditetapkan sebesar 100 %

Program dan indikator kinerja dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator program Nilai Kemudahan Investasi
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator program Persentase Promosi Proyek-Proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta dan Persentase Penguatan Kegiatan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta
3. Program Pengendalian Penanaman Modal dengan indikator program Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
4. Program Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator program Persentase penerbitan izin tepat waktu
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan

indikator program Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator program Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2025 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

RINGKASAN EKSEKUTIFiv

DAFTAR ISIvi

BAB I Pendahuluanvii

 1.1 Latar Belakang.....2

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan3

 1.3 Maksud dan Tujuan8

 1.4 Sistematika Penulisan.....8

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP2

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu25

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi26

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD34

 2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....36

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat46

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu1

Satu Pintu1

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....2

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah2

 3.3 Program dan Kegiatan4

BAB IV Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu5

Satu Pintu5

BAB V Penutup Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 20252

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan. Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Sedangkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah didalamnya memuat perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra PD 2023-2026, RKPD 2025 serta Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2025. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2025 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026, target kinerja pada Ranwal Renja tahun 2025 serta hasil telaah terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
43. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);

44. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
45. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
47. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
48. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
50. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
51. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
52. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
54. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
55. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
56. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

57. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
58. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
59. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
60. Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
61. Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
62. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
63. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Input dan Supervisi Rancangan Awal Rencana Kerja PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
64. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nomor 45/SE/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan I tahun 2024.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2025.

BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu – Isu Penting
Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD,
Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 – 2026 terdapat 2 indikator kinerja utama . Adapun realisasi indikator utama yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

Realisasi Capaian DPMPTSP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Realisasi investasi	128,4 Triliun	166,7 Triliun	129,83%	Sangat Baik
2	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	91 Indeks	94,02 Indeks	103.32%	Sangat Baik

Sumber: DPMPTSP DKI Jakarta

A. Realisasi Investasi



Sumber: Fisk, Tom. Pexels.com

Target realisasi nilai penanaman modal di DKI Jakarta pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp128,4 triliun dengan capaian realisasi penanaman modal sebesar Rp166,7 triliun telah mencapai target yang ditetapkan (129,8%) dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Perbandingan realisasi penanaman modal pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah 143 triliun pada tahun 2022 dan 166,7 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 16,6%.



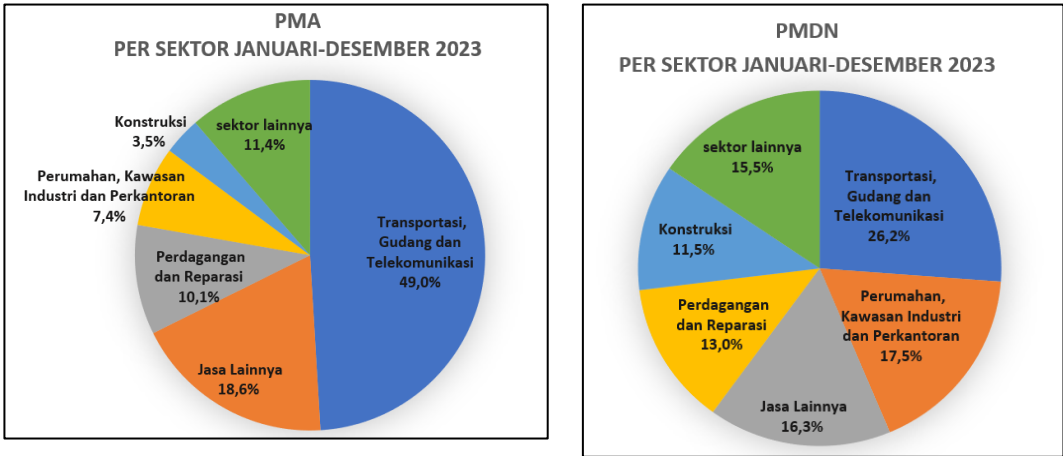
Sumber: Press Release BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia

Pada diagram diatas, nilai PMA periode Januari – Desember 2023 sebesar Rp71,5 triliun atau meningkat sebesar 33,1% dari tahun 2022 (Rp53,7 triliun) sedangkan PMDN periode Januari – Desember 2023 sebesar Rp95,2 triliun atau meningkat sebesar 6,7% dari tahun 2022 (Rp89,2 triliun) pada periode yang sama.

Realisasi terbesar PMA dan PMDN tahun 2023 didominasi oleh PT. Telekomunikasi Selullar sebagai pelaku usaha PMA dengan nilai sebesar Rp25,6 triliun dan PT. Mass Rapid Transit Jakarta Persoda sebagai pelaku usaha PMDN sebesar Rp5,2 triliun.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada realisasi penanaman modal pada periode Januari –Desember 2023 adalah Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai Rp60,0 triliun (36%), Jasa Lainnya Rp 28,8 triliun (17%), dan Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran Rp21,9 triliun (13%). Ketiga sektor ini memiliki kontribusi Rp110,8 triliun atau sebesar 66% dari total Penanaman modal DKI Jakarta pada periode Januari – Desember 2023.

a. Realisasi Investasi Tahun 2023 Berdasarkan Sektor



Sumber: Press Release BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia

Pada diagram diatas tiga sektor PMDN yang memiliki kontribusi terbesar yaitu:

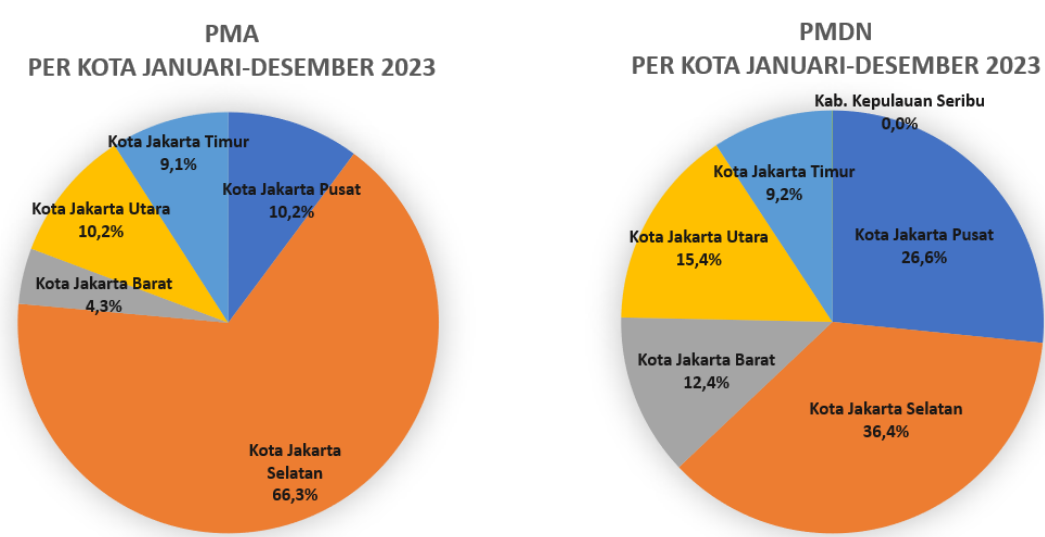
1. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp24,9 triliun (26,2%). Pelaku usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada sektor ini adalah PT. Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda (Rp5,2 triliun) dengan akumulasi kode KBLI (52295) angkutan multimoda dan KBLI (52212) aktivitas stasiun kereta api;
2. Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran yang memiliki nilai realisasi penanaman modal dengan jumlah Rp16,6 triliun (17,5%). Pelaku usaha sebagai penyumbang terbesar pada sektor ini adalah PT. Kencana Graha Optima (Rp1,4 triliun) dengan kode (68111) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
3. Sektor Jasa Lainnya yang mencatatkan nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp15,5 triliun (16,3%). Pelaku usaha yang memiliki nilai realisasi tertinggi di peringkat teratas yaitu PT. Datacenter Indonesia Sukses Perkasa (Rp0,8 triliun) dengan akumulasi kode KBLI (62090) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya dan KBLI (63112) Aktivitas Hosting dan Ybdi;

Sedangkan tiga sektor PMA yang memiliki konstribusi terbesar yaitu:

1. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang menyumbangkan nilai realisasi penanaman modal sebanyak Rp35,1 triliun (49,0%). Realisasi penanaman modal terbesar pada sektor ini didominasi oleh PT. Telekomunikasi Selular (Rp25,6 triliun) dengan kode KBLI (61200) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel dan KBLI pendukung lainnya;
2. Sektor Jasa Lainnya dengan nilai realisasi penanaman modal sebanyak Rp13,3

- triliun (18,6%). Pelaku usaha yang memiliki nilai realisasi tertinggi pada sektor ini antara lain PT. Swadaya Harapan Nusantara (Rp0,7 triliun) dengan kode KBLI (77391) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan dan (77393) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil;
3. Sektor Perdagangan dan Reparasi yang mencatatkan nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp7,2 triliun (10,1%). Pelaku usaha dengan jumlah tertinggi dalam realisasi penanaman modal di sektor ini adalah PT. Traktor Nusantara (Rp0,3 triliun) dengan kode KBLI (46591) perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya.

b. Realisasi Investasi Berdasarkan Sebaran Wilayah Kota / Kab



Sumber: Press Release BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia

Realisasi Investasi PMA dan PMD Tahun 2023

Wilayah Kota/ Kabupaten	Realiasasi Investasi Kumulatif Januari – Desember 2023 (Rp Juta)		Total Realisasi Investasi (Rp Juta)
	PMA	PMDN	
Kota Jakarta Pusat	7.278.305	25.310.169	32.588.474
Kota Jakarta Selatan	47.366.633	34.617.992	81.984.625
Kota Jakarta Barat	3.055.729	11.795.517	14.851.246
Kota Jakarta Utara	7.293.361	14.664.999	21.958.360
Kota Jakarta Timur	6.490.265	8.769.783	15.260.048
Kab. Kepulauan Seribu		43.630	43.630
Grand Total	71.484.292	95.202.091	166.686.383

Sumber: Press Release BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, untuk realisasi PMDN dan PMA terbesar adalah Jakarta Selatan dengan nilai realisasi PMDN sebesar Rp34,6 triliun dan PMA sebesar Rp47,4 triliun.

Target dan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2023

Wilayah Kota/ Kabupaten	Realisasi Investasi Januari – Desember 2023	Target Investasi Januari – Desember 2023	Capaian (%)
Kota Jakarta Pusat	32.588.474	32.100.000	102%
Kota Jakarta Selatan	81.984.625	56.496.000	145%
Kota Jakarta Barat	14.851.246	10.272.000	145%
Kota Jakarta Utara	21.958.360	10.914.000	201%
Kota Jakarta Timur	15.260.048	18.605.160	82%
Kab. Kepulauan Seribu	43.630	12.840	340%
Grand Total	166.686.383	128.400.000	130%

Sumber: Press Release BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia

Dari tabel diatas nilai realisasi penanaman modal terbesar pada periode Januari – Desember 2023 berada pada wilayah Kota Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp82,0 triliun atau mencapai 145% dari target yang ditetapkan pada periode ini.

c. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Organisasi

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
2. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
3. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
4. Kajian penyusunan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif bagi investor.
5. Dikembangkannya *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.

6. Dilaksanakan inventarisasi dan kurasi terhadap 21 proyek-proyek BLUD, BUMD dan swasta sebagai bahan promosi yakni: Bundaran HI Extended Concourse, Fatmawati Extended Concourse, Dukuh Atas Pedestrian Deck, Blok M Mixed Use, Fatmawati Mixed Use, BRT TransJakarta Shelter, Green Shelter Electricity, Pedestrian Shelter Redevelopment, LOT A Ancol Residential Development, LOT B Ancol Mixed-use Development, West Ancol Mixed-use Development, East Ancol Mixed-use Development, New Marina Ancol, Ecopark Mixed-use Development, Ancol Hotel, Putri Duyung Resort, Depo LRT Development, LRT Jakarta Phase 2A - 2B, Medical & Biomedical Waste Facilities, Regional Waste Processing Facilities dan JIEP Lot 4 Project
7. Pelaksanaan kegiatan promosi antara lain :
 - a. Business Matching, Belt and Road Summit 2023 di Hong Kong Bersama dengan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
 - b. Overseas Market Workshop (OMW) - Global Connect: Jakarta & Singapore Sustainable Business Matching, Discovering Jakarta's Sustainable Initiatives and the Government's Crucial Role in their Advancement.
 - c. Forum Bisnis Internasional Renewable Energy and Climate Summit Indonesia – Netherlands
 - d. Pelaksanaan Pertemuan dengan Tomorrow City dalam rangka Persiapan Smart City Expo World Congress - Changsha Stage
 - e. Forum Bisnis Internasional US-Indonesia Investment Summit
 - f. Forum Bisnis Internasional Smart City Expo World Congress - Changsha Stage
 - g. Kegiatan Pengenalan (Outreach) dengan Deputi Bidang Promosi Kementerian investasi/BKPM RI, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, Indonesia-Australia Business Council, UK-ASEAN Business Council, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Seoul, Indonesian Investment Authority (INA)
 - h. Unlocking Capital for Sustainability (UCFS) yang diselenggarakan oleh Eco-Business Singapore bekerja sama dengan Program Lingkungan PBB (UNEP)
 - i. Partisipasi pada kegiatan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 Networking Luncheon dengan tema Passing The Torch for ASEAN-Indo-Pacific yang diselenggarakan oleh Indonesian Business Council (IBC)
8. Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
9. Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan pendampingan pelayanan NIB.
10. Dilaksanakannya bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan dalam penyampaian

LKPM kepada pelaku usaha.

11. Dilaksanakannya fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal terkait kendala realisasi investasi dan sistem OSS RBA.
12. Dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM secara berkesinambungan terhadap sinkronisasi realisasi penanaman modal dan proyek-proyek yang dimonitor agar taat dan tepat waktu dalam menyampaikan LKPM.
13. Dilaksanakannya monitoring, koordinasi dan evaluasi UPPMPTSP tingkat kota, kecamatan dan kelurahan tentang kegiatan penanaman modal.
14. Dilaksanakannya kegiatan sinkronisasi realisasi investasi melalui LKPM untuk UPPMPTSP tingkat kota/kabupaten, kecamatan guna meningkatkan pengetahuan mengenai pelaporan LKPM.

d. Tantangan Dalam Mencapai Target Kinerja Organisasi

1. Pemulihan ekonomi setelah pandemi *COVID-19*.
2. Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
3. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami peralihan sistem OSS 1.1 ke OSS RBA dan beberapa perizinan non perizinan yang beralih ke OSS RBA.
4. Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

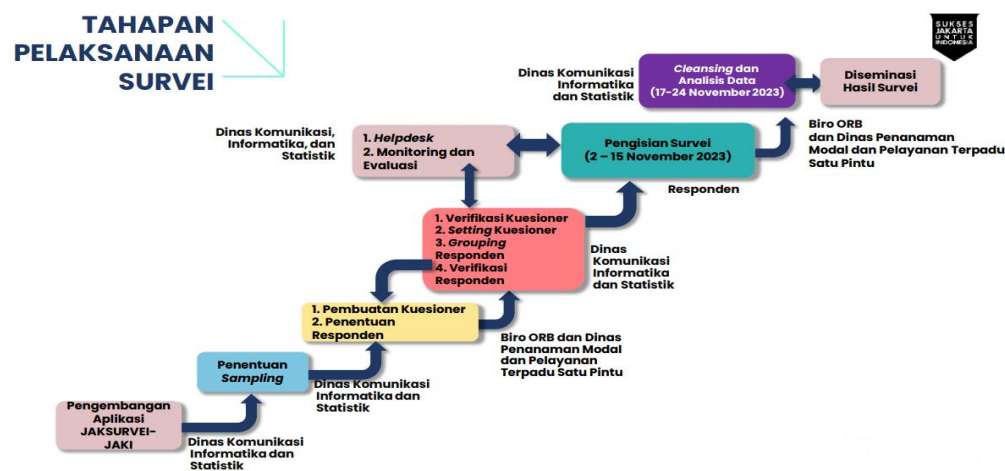
e. Tindak Lanjut Tantangan :

1. Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan. Serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
3. Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
4. Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.
5. Penyusunan kebijakan dan kemudahan investasi.
6. Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
7. Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
8. Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi

B. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

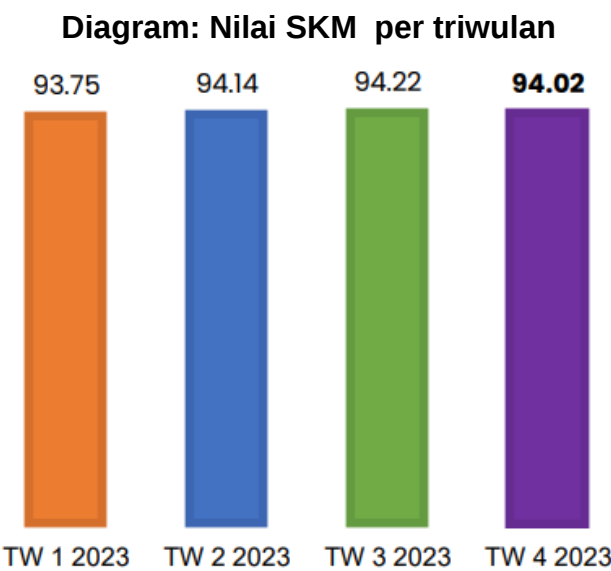
Indeks tingkat kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan metode

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM dilaksanakan di bawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.



Sumber: DPMPTSP DKI Jakarta

Responden Survey adalah masyarakat/pemohon yang telah memperoleh output perizinan dan non perizinan pada sistem <https://jakevo.jakarta.go.id>. Pelaksanaan SKM dilaksanakan setiap triwulan dengan metode secara online sepenuhnya. Untuk Triwulan IV tahun 2023 jumlah responden DPMPTSP adalah 19.851 (menggunakan seluruh responden dari tanggal 28 Juli - 16 November 2023).



Sumber: DPMPTSP DKI Jakarta

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dihitung dengan menggunakan metodekonsolidasi periode *take last know* yakni capaian target menggunakan nilai pada akhir periode. Nilai pada periode terakhir sebesar 94,02 dari

target sebesar 91 atau tercapai sebesar 103,3% dan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 0,8% yakni dari 93,2 pada tahun 2022 menjadi 94,02 pada tahun 2023.

a. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Organisasi

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3. Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga pemohon dapat melakukan survei kepuasan terhadap layanan perizinan/non perizinan yang telah selesai pada dashboard masing-masing.
4. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
5. Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
6. PMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
8. Jumlah service point sebanyak 316 yang tersebar di Tingkat Provinsi hingga Kelurahan. Selain itu juga dibuka layanan di ruang publik (PGC, Koja trade mall, Mal metro Cipulir, Pasar pagi mangga 2, Bella terra lifestyle center kelapa gading, dan Stasiun MRT Blok A Jakarta Selatan), selain itu service center yang bersifat temporary di 4 mall besar (Aeon mall tanjung barat, Aeon mall jakarta garden City, Senayan city mall, dan Mal kelapa gading)
9. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
10. Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat

dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU) sebanyak 5 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Berdasarkan kepada laporan yang telah dihimpun oleh Admin AJIB yang didapat dari laporan harian masing-masing crew AJIB untuk tahun 2023 secara keseluruhan berjumlah 1.201.515 pelayanan dengan rata-rata 100.126 layanan per bulan.

11. Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Total layanan Call Center selama tahun 2023 sebanyak 34.275 layanan.
12. Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
 - 1) Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta untuk tahun 2023 sudah menyelenggarakan pelayanan perizinan sepenuhnya melalui web perizinan yang tersedia seperti Website OSS RBA (Risk Based Approach) kemudian tersedia website perizinan milik DPMPTSP yaitu Website JakEvo dan beberapa website pendukung seperti Website JakPintas dan Website Perizinan untuk Pra Permohonan;
 - 2) Tahun 2023 ini untuk perizinan yang menjadi kewenangan PTSP tingkat Provinsi sudah 100% dapat diterbitkan secara elektronik atau online. Jadi pemohon yang ingin mengajukan izin dapat terlebih dahulu menghubungi call center 1500164 atau komunikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh DPMPTSP. Setelah mengetahui persyaratan dan juga alur pelayanan maka selanjutnya pemohon langsung mengunjungi website yang dimaksud. Selain dari pada itu, pemohon juga dapat memanfaatkan petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) untuk proses perizinan.
 - 3) Bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kualitas layanan informasi publik mengenai data perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu menetapkan SOP terkait Permintaan Data Perizinan dan/ atau Non Perizinan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2022 ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Data Perizinan/ Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pedoman baku tertulis dan bersifat administratif meliputi permintaan data baik itu dari internal maupun eksternal Dinas PMPTSP.

- 4) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan mendukung percepatan pencapaian kemudahan berusaha, perlu menetapkan panduan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor e-0005 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Lingkungan Dpmptsp Provinsi Dki Jakarta;
- 5) Dalam upaya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan sehingga menjadi produktif, berorientasi pada pelayanan prima, mempunyai motivasi tinggi, pekerja keras dan kompetitif maka dibutuhkan indikator-indikator yang menjadi ukuran dalam penilaian dan peringkat maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Peringkat Pelayanan UP PMPTSP di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang mana sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor e-0006 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Peringkat Pelayanan UP PMPTSP Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Bahwa pada tahun 2023, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan penerapan ISO yang meliputi Sertifikasi ruang lingkup baru, Resertifikasi dan Surveillance SNI ISO 9001:2015, serta Surveillance SNI ISO 37001:2016, maka dari itu perlu penyesuaian Tim Sekretariat Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor e-0009 tahun 2023 tentang Tim Sekretariat Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2016 tentang Standardisasi Prasarana dan Sarana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Standardisasi Sarana dan Prasarana

Serta Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor e-0011 tahun 2023 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 8) Dalam rangka memastikan dan membantu monitoring pekerjaan sarana prasarana jaringan utilitas agar terlaksana dengan baik dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan raya sesuai dengan ketentuan dalam Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, maka DPMPTSP menerbitkan Instruksi Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor e-0001 tahun 2023 tentang Monitoring Perizinan Sarana Jaringan Utilitas.
- 9) Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Kepala Dinas PMPTSP menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Unit PTSP di wilayah sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Nomor e-0010 tahun 2023 agar menyelenggaraan inovasi daerah yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya, meliputi menyusun gagasan dan/atau praktik inovasi yang berdampak positif bagi penanganan permasalahan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan; melakukan upaya pengembangan gagasan dan/atau praktik inovasi; dan mendokumentasikan data penyelenggaraan inovasi.
- 10) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera, maka dari itu salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta

mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih adalah dengan melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan. Dari pertimbangan di atas DPMPTSP DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Nomor e-0017 Tahun 2023 tentang Tim Kepatuhan Anti Penyuapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP.

- 11) Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017, DPMPTSP mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor e-0029 Tahun 2023 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang mana Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung yang melibatkan tenaga profesi ahli dan Dinas Teknis selain DPMPTSP maka dari itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor e-0035 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Sistem Manajemen Bangunan Gedung Untuk Pelayanan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 13) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan maka diterbitkan Surat Edaran Nomor e-0012/SE/2023 tentang Kewajiban Bersikap

dan Berprilaku Netralitas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- 14) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga diterbitkan Surat Edaran Nomor e-0013/SE/2023 tentang Penggunaan Jakevo dalam proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran serta Hemat Energi di lingkungan Gedung MPP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Nomor e-0017/SE/2023 tentang Antisipasi Keselamatan, Kebakaran dan Hemat Energi di Gedung Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
- 16) Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi serta Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 368/KIP-DKI/VII/2023 tentang Optimalisasi pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, oleh karena itu terbit lah Surat Edaran Nomor e-0018/SE/2023 tentang Penerapan Gerai Layanan Permintaan Informasi Publik pada Unit Pelayanan di Tingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- 17) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mewajibkan DPMPTSP menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah antara lain meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan infomasi, konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu tentang Penyelenggaraan Pendampingan Perizinan Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor e-0068 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendampingan Perizinan Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

1. Pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*.
2. Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
3. Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
4. Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
5. Peralihan penggunaan Sistem Perizinan/Non Perizinan dari JakEvo ke OSS RBA.

c. Tindak lanjut tantangan :

1. Penyusunan kebijakan dan SOP sebagai tindak lanjut atas perubahan peraturan di tingkat pusat;
2. Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait;
3. Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPSTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli;
4. Melakukan integrasi sistem antara Jakevo dan OSS RBA.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5/7)	10	11	12 = (11/5)	13
DPMPTSP	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
DPMPTSP	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Realisasi Nilai Investasi	492 Triliun	142.95 Triliun	128.4 Triliun	166.7 Triliun	100%	166.7 Triliun	333.4 Triliun	67.76%	
			Score of Business Enabling Environment	80.01	Tidak menjadi target	71.69 Nilai	72.82 Nilai	100%	73.84 Nilai	73.84 Nilai	92,29%	
			Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	91 Indeks	93.2 Indeks	91 Indeks	94.02 Indeks	100%	94.02 Indeks	94.02 Indeks	100%	
			Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	80.1	Tidak menjadi target	72.5 Nilai	72.82 Nilai	100%	75 Nilai	75 Nilai	93,63%	
DPMPTSP	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	50%	
DPMPTSP	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Tidak menjadi target	1 Dokumen	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100%	Tidak menjadi target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100%	Tidak menjadi target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	34 Proyek	Tidak menjadi target	16 Proyek	46 Proyek	100%	22 Proyek	68 Proyek	100%	
DPMPTSP	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	50%	
DPMPTSP	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	90%	Tidak menjadi target	60%	103%	100%	75%	75%	83,33%	
DPMPTSP	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	49.500 Perusahaan	Tidak menjadi target	12.000 Perusahaan	49.856 Perusahaan	100%	12.250 Perusahaan	62.106 Perusahaan	100%	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	45 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	23 Kegiatan Usaha	39.047 Kegiatan Usaha	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47 Kegiatan Usaha	Tidak menjadi target	16 Kegiatan Usaha	1.106 Pelaku Usaha	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	23 Kegiatan Usaha	23 Kegiatan Usaha	100%	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	562 Pelaku Usaha	384 Pelaku Usaha	422 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	465 Pelaku Usaha	465 Pelaku Usaha	100%	
DPMPTSP	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.688 Orang/Bulan	Tidak menjadi target	1.243 Orang/Bulan	1.243 Orang/Bulan	100%	1.243 Orang/Bulan	2.486 Orang/Bulan	43,71%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	14 Dokumen	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	2 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	28 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2000 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	100%	500 Unit	1000 Unit	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Tidak menjadi target	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	37.5%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Tidak menjadi target	80 Unit	80 Unit	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	
DPMPTSP	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	100%	4 Indeks	4 Indeks	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.320 Unit	370 Unit	300 Unit	300 Unit	100%	320 Unit	620 Unit	46,97%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	720 Unit	91 Unit	71 Unit	71 Unit	100%	180 Unit	251 Unit	34,86%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	50%	
DPMPTSP	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	Tidak menjadi target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DPMPTSP	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8 Laporan	Tidak menjadi target	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	50%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	41.543 Pelaku Usaha	Tidak menjadi target	11.366 Pelaku Usaha	332.035 Pelaku Usaha	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	68.536 Pelaku Usaha	68.536 Pelaku Usaha	100%	
DPMPTSP	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	264.1446 Orang	Tidak menjadi target	73.536 Orang	122.167 Orang	100%	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	
DPMPTSP	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	Tidak menjadi target	10.694 Pelaku Usaha	10.694 Pelaku Usaha	100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Nama PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Tahun 2024	Proyeksi Realisasi Renstra s/d tw II 2024		Keterangan
						Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi s/d tw II Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
DPMPTSP	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	90 Indeks	Tidak menjadi target	87 Indeks	92.29 Indeks	100%	88 Indeks	88 Indeks	97.78%	
DPMPTSP	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	Tidak menjadi target	3 Sistem	3 Sistem	100%	3 Sistem	3 Sistem	100%	
DPMPTSP	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	Tidak menjadi target	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	50%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengampu indikator kinerja terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal. Namun mengampu Indikator Kinerja Kunci Outcome sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni pada indikator Persentase peningkatan investasi di provinsi dengan elemen data jumlah investasi dan jika disandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023-2026 dapat disajikan sebagai mana tabel berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR	STANDAR PELAYANAN MINIMUM/ STANDAR NASIONAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	-	-	Persentase peningkatan investasi di provinsi (Elemen Data Jumlah Investasi)	114	120	126	132	142,95	166,7	166,7	166,7	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

a. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan serta Tindak Lanjut

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pengembangan	➤ Perubahan Kebijakan dari pemerintah pusat (antara lain UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan OSS) memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak segera dapat direalisasikan oleh daerah; ➤ Meningkatnya target indeks kepuasan masyarakat dan masih terdapat ketimpangan nilai kualitas layanan diantara UPPMPTSP Kelurahan Kecamatan maupun Kota ; ➤ Peningkatan Kualitas mal pelayanan publik	➤ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya; ➤ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik; ➤ Pelaksanaan Monitoring layanan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan di seluruh unit layanan ➤ Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik
Penanaman modal dan Jakarta Investment Centre	➤ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;	➤ Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta; ➤ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta ➤ Kajian parsial dan komprehensif terhadap

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➤ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi; ➤ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional; ➤ Terbitnya Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya; ➤ Perubahan Regulasi investasi dan atau penanaman modal dikhawatirkan akan memberikan persepsi ketidak pastian dalam berusaha (iklim investasi); ➤ Peningkatan kapasitas SDM DPMPTSP baik tingkat kelurahan, Kecamatan kota dan Dinas dalam kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi,	trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional; ➤ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor ➤ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial); Selling atau Jemput Bola; ➤ Jakarta Investment Center perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional; ➤ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten; ➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah; ➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; ➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan narasumber kompeten; ➤ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal; ➤ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah; ➤ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM; ➤ Jakarta Investment Center belum berjalan secara optimal ➤ Jangka waktu umur proyek yang sangat Panjang sementara masa pemerintahan hanya lima tahun membuat calon investor tidak memiliki kepastian terhadap keberlangsungan dari program ini	yang diagendakan terjadwal; ➤ Diklat, sosialisasi, seminar, <i>Coffee Morning</i> serta pelaksanaan <i>JIC Talks</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya; ➤ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; ➤ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; ➤ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor; ➤ Peningkatan peran dan fungsi Unit Kota dan Kecamatan dalam fungsi pengendalian Penanaman Modal ➤ Mengoptimalkan Jakarta Investment Center sebagai pusat kegiatan dalam melakukan investasi dan penanaman modal ➤ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama; ➤ Menyakinkan calon investor bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak bergantung terhadap masa pemerintahan Gubernur
Pengaduan dan Penyuluhan	➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik ijin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya ijin karena pelanggaran dibidang	➤ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan ijin usaha; ➤ Dibuat panduan tahapan pencabutan ijin usaha

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	pariwisata/spa/panti pijat/hiburan malam dan sebagainya); ➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan ijin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat; ➤ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP; ➤ Peningkatan kualitas dari Kontain media sosial milik DPMPTSP;	akibat adanya pelanggaran ketentuan; ➤ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan ijin usaha terhadap pemilik ijin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian ijin usaha; ➤ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan ijin usaha atau pemindahan ijin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut ijin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang; ➤ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat; ➤ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan; ➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP; ➤ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram,

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➤ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;	facebook, dan media sosial lainnya; ➤ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;
Pelayanan	➤ Langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online; ➤ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain; ➤ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;	➤ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online; ➤ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber; ➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; ➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;
Sekretariat	➤ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPTSP ➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan; ➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;	➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana; ➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan; ➤ Diklat, seminar, atau Coffee Morning yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan; ➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas; ➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;	kompetensi sesuai ANJAB dan ABK; ➤ Dibuat kesepakatan dan kesepakatan bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian; ➤ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan; ➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang; ➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; ➤ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;
Pusat Data dan Informasi	➤ Peningkatan kemandirian DPMPTSP dalam mengembangkan sistem pelayanan online	➤ Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses “<i>transfer knowledge</i>” keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidangnya; ➤ Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, <i>lesson learned</i>, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➤ Target sistem pelayanan online belum mencapai 100%; ➤ Belum tersedianya SDM IT yang cukup di lingkungan DPMPTSP;	➤ Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi untuk menunjang layanan capaian layanan 100% online; ➤ Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini; ➤ Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis;
UPPMPTSP Kota/Kecamatan/Kelurahan	➤ Pesebaran sarana prasana yang standar belum merata ➤ Pemenuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi ➤ Perubahan kebijakan yang membutuhkan respon cepat seringkali terlambat tersampaikan secara merata ke unit, sehingga seringkali terdapat	➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana; ➤ Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan Unit ➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; ➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis; ➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; ➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan ➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	perbedaan kebijakan layanan di masing-masing unit ➤ Penguatan fungsi Penanaman Modal di Unit Kota/Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya dipahami unit layanan	segera serta dapat diinisiasi oleh bidang terkait ➤ Pemanfaatan teknologi informasi dan penyiapan call center khusus untuk pelayanan internal kebijakan ➤ Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, diklat terkait fungsi penanaman modal bagi unit terkait guna meningkatkan kompetensi;

Sumber: Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

b. Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta 2023 – triwulan I 2024 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, isu-isu strategis yang menjadi fokus DPMPTSP pada periode 2025 – 2026 mencakup:

1. Perbaikan iklim penanaman modal yang diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi di DKI Jakarta
2. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan

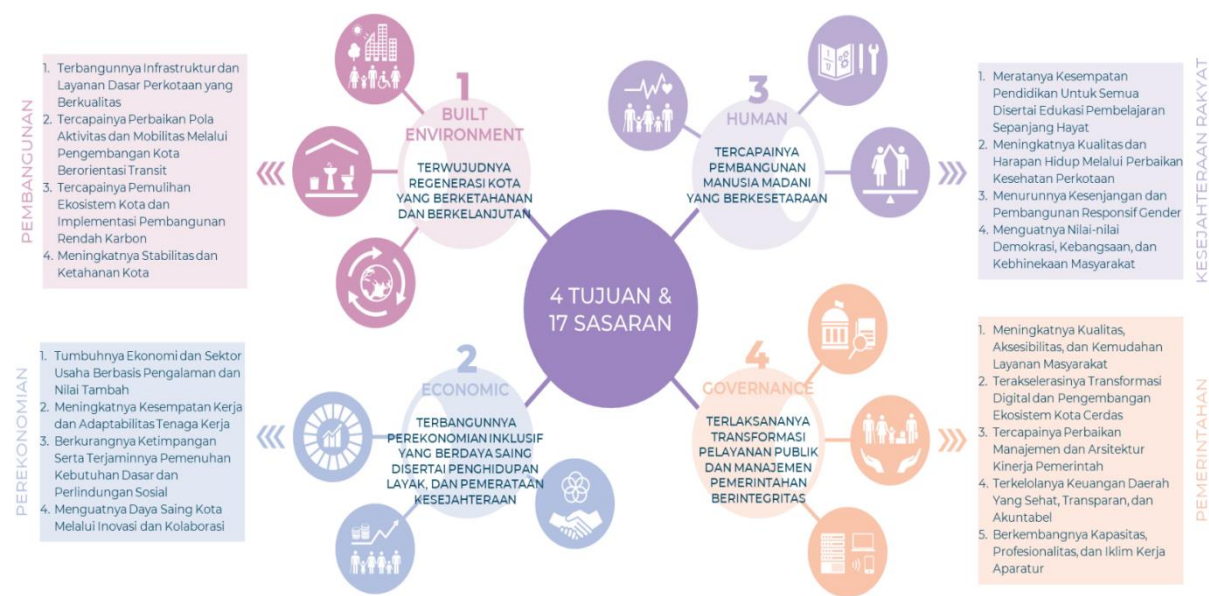
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan tahap pembangunan ketiga dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun, rumusan konsep sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD tetap mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017- 2022, dan 6 isu strategis 2023-2026. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen RPD 2023-2026 juga sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu “Mencapai Kota Jakarta yang Berdaya Saing Global Berlandaskan Kapasitas Sarana dan Prasarana yang Memadai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan serta Kapasitas Inovasi Daerah yang Terus Meningkat”. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah:

“PENGUATAN KETAHANAN KOTA MELALUI PEMBANGUNAN YANG MERATA, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN”

Ketahanan kota itu sendiri didefinisikan sebagai kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (stress). Fokus terhadap penguatan ketahanan kota inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan Daerah, DPMPTSP terlibat pada **tujuan kedua** Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan pada sasaran Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan dan pada **tujuan keempat** Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas, dengan sasaran Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat;



Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, strategi disusun sebagai langkah yang ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang berisi program indikasi untuk mewujudkan dimensi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Sasaran Pembangunan : Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi Melalui strategi pembangunan :
 - a. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.
 - b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
 - c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Sasaran Pembangunan : Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat dalam dokumen RPD tidak secara spesifik menyinggung peran DPMPTSP, namun fungsi DPMPTS sebagai salah satu Unit pelaksana layanna masyarakat tetap terlibat dalam pencapaian sasaran ini.

2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak pencapaian suatu target pembangunan. Prioritas pembangunan disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Hal tersebut nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan idealnya disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD), pengembangan sektor/bidang unggulan daerah, dan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2023, dan fokus pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang tertera dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, untuk tahun 2025, rumusan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan parameter Kota Global sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun rumusan prioritas pembangunan terkait DPMPTSP untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

ISU PRIORITAS RPD Ketahanan Ekonomi Inklusif dengan isu pembangunan Pertumbuhan Ekonomi yang kemudian dirumuskan dalam Prioritas pembangunan Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan fokus utama yaitu Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*), Pengembangan Riset dan Inovasi dan Peningkatan Daya Tarik Iklim Investasi. ISU PRIORITAS RPD Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik DENGAN ISU PEMBANGUNAN Tata Kelola Pemerintahan yang dirumuskan dalam prioritas pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adptif dengan fokus utama Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik



Penyelenggaraan **Jakarta Investment Award** untuk memberikan apresiasi terhadap peran serta para investor dalam menumbuhkan perekonomian di DKI Jakarta.

Adapun untuk mendukung Prioritas pembangunan **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dirumuskan program

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dan untuk mendukung prioritas pembangunan **Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dirumuskan program

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	609.494.500.449	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	601.766.777.141	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	386.741.190	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	386.701.577	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	386.741.190	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	386.701.577	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	565.695.902.587	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	566.937.923.785	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.190 Orang/Bulan	565.678.540.166	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.134 Orang/Bulan	566.910.584.825	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	17.362.421	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	27.338.960	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	6.191.677.883	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	5.033.000.293	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.316.170	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	114.320.911	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.949.380.469	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.649.420.311	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	199.566.796	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	199.564.098	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.764.034	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.549.075	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	89.610.080	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	89.610.080	
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.347.664.464	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.345.994.085	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	398.279.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	168.280.000	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	476.110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	208.863.000	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	98.986.870	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	98.398.733	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	17.449.550.367	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	9.815.238.912	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	251.734.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500 Unit	14.427.440.635	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit	7.729.944.935	
2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	611 Unit	3.022.109.732	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	124 Unit	1.833.559.177	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	16.411.028.405	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	16.872.542.860	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.775.016.355	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.929.793.340	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.522.768.321	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.522.765.948	
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.631.847.680	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.631.847.680	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.481.396.049	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.788.135.892	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	3.359.600.017	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	2.721.369.714	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 Unit	442.047.272	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	442.042.938	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	539.097.798	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	280.079.298	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	254.473.724	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	454.416.024	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.123.981.223	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.544.831.454	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Nilai kemudahan investasi	77,5 Nilai	3.865.390.821	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Nilai kemudahan investasi	77,5 Nilai	5.309.947.694	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	3.616.178.321	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	5.060.735.194	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	3.616.178.321	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	5.060.735.194	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	DKI Jakarta	Persentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu	100%	249.212.500	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	DKI Jakarta	Persentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu	100%	249.212.500	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	249.212.500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	249.212.500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100%	11.378.460.855	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100%	11.378.016.079	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100%	0			Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100%		
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	28 Proyek	11.378.460.855	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	28 Proyek	11.378.016.079	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	11.378.460.855	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	11.378.016.079	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	153.063.682.145	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100%	146.149.397.505	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Laporan	153.063.682.145	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Laporan	146.149.397.505	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	63.536 Pelaku Usaha	10.050.202.481	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	63.536 Pelaku Usaha	9.751.154.104	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.000 Pelaku Usaha	143.013.479.664	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.000 Pelaku Usaha	136.398.243.401	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	3.608.985.815	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	3.517.246.540	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	12.500 Perusahaan	3.608.985.815	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	12.500 Perusahaan	3.517.246.540	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	1.458.817.288	Pengawasan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	1.458.725.489	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DKI Jakarta	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	23 Kegiatan Usaha	1.812.392.997	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DKI Jakarta	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	23 Kegiatan Usaha	1.720.811.715	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha	337.775.530	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha	337.709.336	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	91 Indeks	14.958.545.057	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	92.29 Indeks	15.051.746.787	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp796.369.565.142)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 783.173.131.746)	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	14.958.545.057	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	15.051.746.787	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga penelitian, akademisi maupun dari perangkat daerah dari Provinsi hingga kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung maupun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi.

Seluruh data aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang telah difasilitasi melalui sistem teknologi informasi yang dapat diakses melalui portal musrenbang.jakarta.go.id. Berdasarkan penarikan data pada sistem tersebut terdapat satu usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			(4)		
(1)	(2)	(3)	NIHIL	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

*

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

3

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mendukung prioritas Pembangunan nasional tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 pada agenda Transformasi Ekonomi dengan sasaran Agenda Pembangunan RPJMN Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, serta Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global. Selain itu terlibat dalam mendukung agenda Transformasi Tata Kelola dengan sasaran Agenda Pembangunan RPJMN Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merujuk kepada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota
Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota diukur melalui Indikator **Realisasi Investasi**. Realisasi nilai investasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Nilai realisasi investasi diperoleh dari perhitungan jumlah nilai penanaman modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.
Dalam rangka meningkatnya kualitas iklim penanaman modal untuk mendukung pembangunan kota maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan sasaran Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dengan indikator **Score of Business Enabling Environment**. Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan layanan publik dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam konteks data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal. Diukur melalui hasil survey kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: kemudahan akses perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan perpajakan, dukungan infrastruktur. Hasil diwujudkan dalam skala: Kurang Menarik : <51,0 Cukup Menarik : 51,1 - 61,0 Menarik : 61,1 - 80,0 Sangat Menarik : >80,1.
2. Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui

Reformasi Perizinan. Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan diukur melalui **Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu**. Mengacu pada PermenPAN & RB No 14/2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara daring penuh melalui sistem perijinan. Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalui sistem jakevo.jakarta.go.id (kuesioner elektronik) setelah pemohon memperoleh izin/non izin dan bersifat non mandatory (tidak wajib mengisi).

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi layanan yang dilaksanakan ooleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui media daring sehingga dalam menyusun rangka pencapaian tujuan Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizina dirumuskan sasaran Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan dengan indikator **Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online**. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan. Izin yang Diterbitkan Secara Online adalah penerbitan izin yang menggunakan sistem perizinan dan nonperizinan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPSTP Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota		Realisasi Nilai Investasi	128.4 Triliun	166.7 Triliun	166.7 Triliun	132 Triliun
		Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Score of Business Enabling Environment	71.69	73.84	76.05	80.01
2	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan		Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	91	91	94.02	91
		Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPMPSTP

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan program yang terdapat di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 yakni:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

**Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikatif
Perangkat Daerah Tahun 2024**



Mengacu RKPD Provinsi DKI Jakarta, mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya serta target kinerja tahun 2025 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional berikut dirumuskan rincian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran indikatif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana termuat dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DKI Jakarta		822.333.381.965	PAD			
DINAS PMPTSP	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Realisasi Nilai Investasi	DKI Jakarta	166,7 Triliun		PAD		132 Triliun	
			Score of Business Enabling Environment	DKI Jakarta	76,05 Nilai		PAD		80.01	
			Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	94,02 Indeks		PAD		91 Indeks	
			Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	DKI Jakarta	100%		PAD		100%	
DINAS PMPTSP	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	DKI Jakarta	77,5 Nilai	5.309.947.694	PAD		80.1	2.144.340.867
DINAS PMPTSP	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	DKI Jakarta	100%	5.060.735.194	PAD		100%	2.144.340.867

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	4 Dokumen	5.060.735.194	PAD		4 Dokumen	2.144.340.867
DINAS PMPTSP	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu	DKI Jakarta	100%	249.212.500	PAD		-	-
DINAS PMPTSP	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	DKI Jakarta	1 Dokumen	249.212.500	PAD		-	-
DINAS PMPTSP	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	DKI Jakarta	100%	11.378.016.079	PAD		100%	11.467.035.871
DINAS PMPTSP	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	DKI Jakarta	100%	0	PAD		100%	
DINAS PMPTSP	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	DKI Jakarta	28 Proyek	11.378.016.079	PAD		34 Proyek	11.467.035.871
DINAS PMPTSP	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	DKI Jakarta	4 Dokumen	11.378.016.079	PAD		4 Dokumen	11.467.035.871
DINAS PMPTSP	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	3.517.246.540	PAD		90%	2.222.605.927
DINAS PMPTSP	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	12.500 Perusahaan	3.517.246.540	PAD		12.750 Perusahaan	2.222.605.927

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DKI Jakarta	50 Kegiatan Usaha	1.458.725.489	PAD		Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD	Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD
DINAS PMPTSP	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DKI Jakarta	23 Kegiatan Usaha	1.720.811.715	PAD		Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD	Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD
DINAS PMPTSP	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	500 Pelaku Usaha	337.709.336	PAD		Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD	Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD
DINAS PMPTSP	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	601.766.777.141	PAD		4 Indeks	
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	DKI Jakarta	100%	386.701.577	PAD		100%	156.047.233
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4 Laporan	386.701.577	PAD		4 Laporan	156.047.233
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	566.937.923.785	PAD		4 Indeks	594.889.919.441

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	1.134 Orang/Bulan	566.910.584.825	PAD		1527 orang	594.853.321.070
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	27.338.960	PAD		7 Dokumen	36.598.371
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	5.033.000.293	PAD		4 Indeks	35.057.959.338
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	114.320.911	PAD		4 Paket	318.626.922
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	2.649.420.311	PAD		7 Paket	26.484.025.760
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	199.564.098	PAD		1 Paket	180.000.000
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	158.549.075	PAD		1 Paket	151.010.673
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	89.610.080	PAD		7 Paket	3.501.086.780
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	1.345.994.085	PAD		1 Paket	1.727.001.541
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	168.280.000	PAD		7 Laporan	1.428.103.831
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	208.863.000	PAD		14 Laporan	1.128.103.831

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	98.398.733	PAD		1 Dokumen	140.000.000
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	9.815.238.912	PAD		4 Indeks	30.842.480.209
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	251.734.800	PAD		1 Paket	3.690.000.000
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	250 Unit	7.729.944.935	PAD		500 Unit	22.317.480.875
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	124 Unit	1.833.559.177	PAD		4 Unit	3.637.974.427
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	16.872.542.860	PAD		4 Indeks	50.329.445.627
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	12 Laporan	3.929.793.340	PAD		4 Laporan	4.935.743.642
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	2.522.765.948	PAD		4 Laporan	4.860.946.112
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	2.631.847.680	PAD		4 Laporan	3.400.546.771
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	7.788.135.892	PAD		7 Laporan	37.132.209.102

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	2.721.369.714	PAD		4 Indeks	12.185.103.580
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	120 Unit	442.042.938	PAD		350 Unit	2.525.814.838
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	150 Unit	280.079.298	PAD		180 Unit	1.890.304.949
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	1 Unit	454.416.024	PAD		1 Unit	3.621.149.239
DINAS PMPTSP	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	2 Unit	1.544.831.454	PAD		25 Unit	37.062.667
DINAS PMPTSP	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta	100%	146.149.397.505	PAD		100%	238.313.795.536
DINAS PMPTSP	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	4 Laporan	146.149.397.505	PAD		2 Laporan	238.313.795.536
DINAS PMPTSP	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	63.536 Pelaku Usaha	9.751.154.104	PAD		Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD	Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
DINAS PMPTSP	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	11.000 Pelaku Usaha	136.398.243.401	PAD		Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD	Merupakan Sub Kegiatan Baru Diluar RKPD
DINAS PMPTSP	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	DKI Jakarta	92,29 Indeks	15.051.746.787	PAD		90 Indeks	21.130.578.835
DINAS PMPTSP	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	DKI Jakarta	3 Sistem	15.051.746.787	PAD		3 Sistem	21.130.578.835
DINAS PMPTSP	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DKI Jakarta	4 Dokumen	15.051.746.787	PAD		4 Dokumen	21.130.578.835
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	6.264.539.666	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.162.688	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.469.949.077	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	988.147.708	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	138.837.149	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	31.298.400	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	260.795.820	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	26.820.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	24.050.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	194.448.679	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	194.448.679	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	4.144.145.704	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	4.144.145.704	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	453.833.518	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	59 Unit	250.682.935	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	175 Unit	139.142.828	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	95 Unit	64.007.755	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	10.600.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	120 Perusahaan	10.600.000	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Pusat	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	120 Pelaku Usaha	10.600.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.114.799.749	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.633.280	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	1.633.280	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.493.296.949	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	1.055.674.812	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	90.788.880	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	52.051.117	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	222.982.140	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	19.800.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	52.000.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	189.606.254	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	189.606.254	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	3.072.383.884	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	3.072.383.884	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	357.879.382	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	23 Unit	97.477.606	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	437 Unit	211.681.776	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	25 Unit	48.720.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	113.181.219	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	75 Perusahaan	113.181.219	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Utara	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	75 Pelaku Usaha	113.181.219	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	7.857.294.332	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.985.334.045	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	13.991.241	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	3 Paket	1.358.493.696	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	13.808.638	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	132.417.457	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	62.596.800	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	346.040.701	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	23.860.512	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	34.125.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	258.130.572	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	258.130.572	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.001.555.160	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	5.001.555.160	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	610.111.867	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	69 Unit	357.182.174	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	180 Unit	184.729.488	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	25 Unit	68.200.205	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta	100%	13.407.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	1 Laporan	13.407.938	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	50 Pelaku Usaha	13.407.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	98.855.600	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	500 Perusahaan	98.855.600	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Barat	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	500 Pelaku Usaha	98.855.600	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	9.127.452.631	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.162.688	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	2.396.281.383	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	1.738.316.307	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	13.521.132	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	244.804.067	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	13.910.400	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	120.441.600	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	33.587.877	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	231.700.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	193.853.932	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	34 Unit	193.853.932	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.787.513.828	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	5.787.513.828	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	747.640.800	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	30 Unit	104.128.486	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	495 Unit	450.326.232	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	283 Unit	193.186.082	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	121.796.788	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	100 Perusahaan	121.796.788	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DKI Jakarta	65 Kegiatan Usaha	60.000.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Selatan	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	100 Pelaku Usaha	61.796.788	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	8.135.097.336	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.971.200	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	1.971.200	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.919.501.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	1.315.087.214	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	143.469.710	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	33.253.769	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	340.359.645	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	25.905.600	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	61.426.000	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	106.934.167	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	16 Unit	106.934.167	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.787.513.828	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	5.787.513.828	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	319.176.203	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	74 Unit	145.360.430	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	150 Unit	119.655.365	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	20 Unit	54.160.408	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta	100%	13.407.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	4 Laporan	13.407.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	55 Pelaku Usaha	13.407.938	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	DKI Jakarta	85%	98.277.840	PAD			
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	100 Perusahaan	98.277.840	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Jakarta Timur	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DKI Jakarta	100 Pelaku Usaha	98.277.840	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	1.508.393.174	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.162.688	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	358.909.987	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	3 Paket	219.942.567	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	56.603.820	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	41.358.600	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	24.300.000	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	16.705.000	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	261.048.934	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	125.597.254	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Unit	135.451.680	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	785.958.668	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	785.958.668	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	100.312.897	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	4 Unit	88.552.897	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	25 Unit	11.760.000	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	DKI Jakarta	100%	683.146.008	PAD			
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	2 Laporan	683.146.008	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target	Pagu Indikatif (Rp 822.333.381.965)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
UP PMPTSP Kep Seribu	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	10.000 Pelaku Usaha	683.146.008	PAD			

**Penutup Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2025**

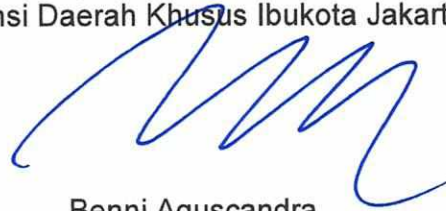
5

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2025 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Benni Aguscandra

NIP. 196908081997031004